

ABSTRAK

ANALISIS PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA WATUDAKON KECAMATAN KESAMBEN JOMBANG PERIODE 2019-2027

Didit Siswantoro
212365201020

Pembimbing 1: Nieke Rudyanty Winanda, S. AP. M.Si

Pembimbing 2: Drs. Hudallah, M.Si

Penelitian ini menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Jombang. BPD memiliki fungsi legislasi, pengayoman, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, BPD berperan aktif dalam merumuskan dan membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, memastikan peraturan mencerminkan aspirasi masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsi pengayoman BPD mencakup penampungan dan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, serta memberikan masukan untuk pembangunan desa yang lebih baik. Dalam fungsi pengawasan, BPD bertanggung jawab mengawasi kinerja Kepala Desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelaksanaan program pembangunan, serta memberikan teguran dan arahan jika terjadi penyimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Watudakon telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut meskipun belum optimal, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam rapat. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya dana operasional, rendahnya partisipasi anggota BPD, dan keterbatasan pemahaman masyarakat tentang fungsi BPD. Faktor pendukung terjalannya tugas BPD adalah dukungan dari pemerintah desa, sistem pemilihan anggota BPD yang meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan komunikasi yang baik antara BPD dan berbagai pihak. Hubungan yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas anggota BPD dan sosialisasi kepada masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran BPD dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Kata Kunci: Pengawasan, BPD, Desa, Peran, Upaya.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE SUPERVISORY ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT IN WATUDAKON VILLAGE, KESAMBEN DISTRICT, JOMBANG PERIOD 2019-2027

Didit Siswantoro
212365201020

Supervisor 1: Nieke Rudyanty Winanda, S. AP. M.Si

Supervisor 2: Drs. Hudallah, M.Si

This study analyzes the role of the Village Consultative Body (BPD) in the administration of village governance in Watudakon Village, Kesamben District, Jombang. The BPD has legislative, advisory, and supervisory functions. In its legislative function, the BPD plays an active role in formulating and discussing draft village regulations with the Village Head, ensuring that the regulations reflect community aspirations and comply with statutory provisions. The BPD's advisory function includes accommodating and conveying community aspirations to the village government, as well as providing input for better village development. In its supervisory function, the BPD is responsible for overseeing the performance of the Village Head, village financial management, and the implementation of development programs, as well as providing warnings and direction in the event of deviations. The results of the study indicate that the BPD in Watudakon Village has carried out these functions, although not optimally, especially in terms of community participation in meetings. Obstacles faced include a lack of operational funds, low participation of BPD members, and limited community understanding of the BPD's functions. Supporting factors for the implementation of BPD duties are support from the village government, a BPD member election system that increases community trust, and good communication between the BPD and various parties. A harmonious relationship between the BPD and the village government is crucial for achieving effective governance that is responsive to community needs. Efforts to increase the capacity of BPD members and outreach to the community are needed to optimize the BPD's role in realizing transparent, participatory, and accountable village governance.

Keywords: *Supervision, BPD, Village, Role, Efforts.*